

# Menuju Satpol PP yang Humanis, Profesional, dan Berwibawa

Tunjung Sulaksono  
HUT Satpol PP Kab Bantul ke-69  
Tirenggo Bantul, 12 Maret 2019

# Sekilas Sejarah Satpol PP

- *Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon (PP No. 1/1948 tgl 30 Oktober 1948)*
- *Detasemen Polisi Pamong Praja (10 Nopember 1948)*
- *Kesatuan Polisi Pamong Praja (KepMendagri No.UP.32/2/21 tgl 3 Maret 1950)*
- *Kesatuan Pagar Baya (Permen Pemerintahan Umum & Otda No. 10/1962)*
- *Kesatuan Pagar Praja (Surat Menteri Pemerintahan Umum & Otda No.1 Tahun 1963).*
- *Polisi Pamong Praja (UU No.5 Tahun 1974)*
- *Satuan Polisi Pamong Praja (UU No.22/1999) smp skrg*

# Satpol PP Zaman Now

- Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk: (1) menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (2) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta (3) menyelenggarakan perlindungan masyarakat (PP No. 16 Tahun 2018)

# Visi

- ***Menjadi Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang Professional untuk terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang tertib dan tenteram"***

# Misi

- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan budaya kerja yang responsif.
- Mewujudkan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah yang demokratis dan partisipatif.
- Membangun sinergitas dengan organisasi perangkat daerah dan masyarakat untuk mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

# Tantangan

- Sbg ujung tombak pemda dlm upaya memelihara ketertiban umum & ketenteraman masyarakat, aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala dan tindakan reaktif masyarakat dalam melaksanakan tugas
- Citra satpol PP sering negatif akibat benturan<sup>2</sup> yang kadang kala sulit utk dihindari dlm pelaksanaan tugasnya
- Citra negatif bisa muncul krn: 1) kelemahan internal organisasi, maupun 2) persepsi masy yg terlanjur terbangun
- Tanpa upaya sistematis utk melakukan perubahan, akan berdampak munculnya *distrust* dari publik

# Strategi “Double Track”

- Dlm paradigma *governance*, menumbuhkan kepercayaan masy. mrp kunci keberhasilan penyelesaian urusan2 publik
- Karena terkait dengan faktor internal dan eksternal, ada 2 dimensi yg minimal harus dilakukan secara simultan:
  - Pembangunan Kelembagaan Satpol PP
  - Pembangunan Citra Positif Satpol PP

# Pembangunan Kelembagaan Satpol PP

- Sistem Kelembagaan pemerintahan mrp sistem yg menunjukkan relasi antara tugas, fungsi, kewenangan, dan prosedur antar tingkatan pemerintahan dlm melaksanakan visi, misi, dan kebijakan yg diamanatkan.
- Kelembagaan yg baik memperhatikan dasar-2 pembentukan kelembagaan yg kuat dan berkekuatan hukum, namun harus memiliki muatan lokal yg menjiwai organisasi yang dijalankan sbg bagian dari visi organisasi.



# Pembangunan Kelembagaan Satpol PP

- Pengembangan kelembagaan minimal harus memuat aspek2 antara lain:
  - Regulasi
  - Aktivitas (Program dan kegiatan)
  - Struktur organisasi
  - Sumber daya manusia
  - Sarana prasarana

# Regulasi

- seperangkat peraturan yg mengatur ttg tujuan yg hendak dicapai, strategi mencapai tujuan, dan pedoman utk melaksanakan strategi, serta kewenangan, dan tugas dan fungsi lembaga dlm rangka mencapai tujuan dari organisasi

# Aktivitas (Program dan kegiatan)

- Program dan kegiatan satpol PP perlu di re-desain agar lebih banyak mencegah persoalan di hulu, bukan di hilir
- Tindakan2 preventif melalui sosialisasi, “sapa warga”, kegiatan2 inklusif bersama warga, perlu diperbanyak utk mendekatkan satpol PP dg warga sekaligus memupus predikat “seram” yg mungkin ada
- (credit foto: tribunjogja)



# Struktur Organisasi dan Tata Kerja

- Pada satu sisi, struktur organisasi dan tata kerja harus mampu menjamin pencapaian visi-misi secara efektif
- Namun pada sisi lain, struktur organisasi harus didesain untuk bisa dinamis untuk merespon perubahan
- Perubahan adalah suatu keniscayaan, organisasi harus secara cepat merespon perubahan tsb

# SDM

- Sumberdaya manusia adalah elemen terpenting yang dibutuhkan sbg pelaksana kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga
- SDM harus selalu diupayakan utk mendekati idealitas dalam hal kualitas serta kuantitas personil Satpol PP
- Kualifikasi harus sesuai kebutuhan organisasi, kuantitas harus sesuai perbandingan ideal

# Sarpras

- Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk mencapai visi-misi organisasi, baik berupa pendanaan, peralatan, maupun dukungan fasilitas

# Strategi SDM

- Strategi pengembangan SDM harus sudah dimulai sejak tahap perencanaan rekrutmen
- Tidak cukup dg memprioritaskan yg bisa beladiri, tetapi juga yang memiliki kemampuan dan kemauan utk membangun dialog (tes psikologi/kejiwaan utk mencari karakter sesuai yg diinginkan)
- Pola pendidikan yang selaras dengan strategi pengembangan SDM

# Pembentukan Citra Positif

- Pada saat bersamaan, pembangunan kelembagaan harus dijalankan bersamaan dengan pembangunan citra positif melalui media (massa, elektronik, maupun medsos: facebook, twitter, instagram )
- Pelaksanaan program/kegiatan satpol PP perlu diliput dengan menonjolkan karakter yang dikehendaki, misal: humanis, profesional, berwibawa



# Strategi

- Pengelolaan web satpol PP harus lebih serius (admin khusus, tidak bisa disambi2)
- Satpol harus meliput kegiatan2 dan menampilkan foto-foto yg menampilkan nuansa2 yg dikehendaki tadi
- Satpol harus segera mengimbangi berita yang negatif dengan berita-2 yg positif
- Menjalin kemitraan dg kawan2 media (*media gathering*, dsb)
- Membuat *branding*, *tagline*, *tagar* yg menggambarkan karakter yg diinginkan, misal: Dialog First!

# Satpol Humanis

**Sapa Warga**  
(credit foto: tribun Jogja)



**Kedepankan Dialog**  
(credit foto: JIBI)



# Donor Darah

(credit foto: satpol PP Bantul)



# Satpol Profesional

**Workshop Pengembangan Kapasitas  
(credit foto: satpol PP Bantul)**



**Penertiban Peredaran Miras  
(credit: satpol PP Bantul)**





# Satpol Berwibawa

**Penertiban PKL**  
Credit foto: Sindo



**Sidang Miras**  
Credit foto: Satpol PP Bantul



# PENUTUP

- Kewibawaan Satpol PP bukan diukur dari pakaian dan atributnya, melainkan dilihat dari konsistensinya menegakkan aturan secara proporsional dan profesional. Sepanjang Satpol PP “tidak dapat dibeli”, masyarakat akan menaruh rasa hormat dan segan. (Sadu Wasistiono, 2010)